

Signifikansi Nauru dalam Kebijakan Bantuan Finansial Australia (2001-2008)

Bramantyo Tri Asmoro

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Raden Rahmat

bramtriasmoro@gmail.com

Abstrak

Australia setiap tahun mempunyai kebijakan bantuan luar negeri yang difokuskan pada kawasan Asia Pasifik. Untuk kawasan Pasifik Selatan, Australia memfokuskan pada negara-negara Melanesia seperti Papua Nugini, Solomon Islands, Fiji dan Vanuatu. Namun sejak tahun 2001, Australia meningkatkan bantuan finansial ke sebuah negara kecil bernama Nauru. Nauru terletak di kawasan Micronesia dan mempunyai ukuran yang sangat kecil. Dibandingkan dengan negara Pasifik Selatan lainnya, bantuan Australia ke Nauru cenderung terus meningkat. Fakta ini menimbulkan suatu pertanyaan, mengapa Australia meningkatkan bantuan finansialnya ke Nauru, khususnya sejak tahun 2001?

Dalam menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan teori motivasi bantuan luar negeri, keamanan regional, dan konsep pertahanan Australia, yaitu *continental defence*. Hasil dari penelitian ini adalah Australia meningkatkan bantuan finansial ke Nauru karena ingin menjaga keamanan regional. Nauru terancam menjadi negara gagal hingga dapat memberikan efek yang buruk terhadap keamanan regional Pasifik Selatan.

Kata Kunci : bantuan luar negeri, keamanan regional, negara gagal.

Abstract

Australia has foreign aid policy distributed to Asia Pacific region annually. Specifically for South Pacific region, Melanesian countries such as Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji and Vanuatu had always been main priorities. But since 2001, Australia increased its financial aid to Nauru, a small country located in Micronesia. Compared to other countries in South Pacific, Australia's financial aid to Nauru tends to increase. This fact raise a question about why Australia increased its financial aid to Nauru, especially since 2001?

To answer the question, the writer use foreign aid motivation theory, regional security, and Australia's defence concept, continental defence. The result of this research is, Australia increased its financial aid to Nauru because Australia want to maintain regional security. Nauru is potential failed state that can disturbed regional security in South Pacific

Keywords : failed state, foreign aid, regional security

Australia merupakan salah satu dari negara besar yang mempunyai program kebijakan bantuan luar negeri. Pada awal tahun 1980an, Australia menghabiskan sekitar \$840 juta dalam program bantuan luar negeri. Pada tahun 1997-1998, anggaran meningkat menjadi \$1,4 milyar, dan pada tahun 2006-2007, anggaran meningkat lagi menjadi \$2,9 milyar. Bantuan luar negeri Australia difokuskan pada empat tujuan, yaitu (www.globaleducation.edna.edu.au, 2008) :

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan infrastruktur dan tenaga kerja yang terlatih, manajemen bencana alam, dan mempromosikan perdagangan.
- Mengembangkan negara dengan pemerintahan yang baik dan efektif tidak hanya di pemerintah pusat, namun juga di pemerintahan lokal.
- Melakukan investasi terhadap manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan.
- Meningkatkan kerjasama dan stabilitas regional.

Bentuk bantuan Australia bisa berupa membantu penegakan hukum, mencegah konflik dan membantu pemulihan pasca konflik, serta membantu mengurangi ancaman internasional yang dapat mengganggu keamanan seperti penyelundupan manusia, obat-obatan terlarang dan AIDS. Ketika negara-negara lain membutuhkan bantuan, maka Australia merespon dengan memberikan bantuan uang, barang, dan personel. Salah satu negara di Pasifik Selatan yang menerima bantuan dari Australia adalah Nauru. Kebijakan bantuan luar negeri Australia pada Nauru dimulai tahun 1992, dengan jumlah bantuan sebesar \$2,8 juta hingga \$3,4 juta tiap tahunnya (www.news.bbc.co.uk, 2008). Tahun 2001, Nauru direncanakan menerima bantuan dengan jumlah \$3,4 juta, namun pada 10 September 2001, Presiden Nauru, Rene Harris dan Menteri Pertahanan Australia, Peter Reith menandatangani perjanjian *Statement of Principles and First Administrative Agreement (FAA)* (Taylor, 2005). Dalam perjanjian FAA, Nauru direncanakan menerima bantuan tambahan sebesar AUD\$20 juta. Sebanyak AUD\$16,5 juta diberikan dalam bentuk generator-generator yang digunakan untuk air dan listrik, kemudian dialokasikan dalam sektor kesehatan dan pendidikan (Simon, 2008).

Perjanjian FAA digantikan oleh perjanjian baru, yaitu *Cooperation in Administration of Asylum Seeker and Related Issues* pada 11 Desember 2001 (Taylor, 2005). Dalam *MoU* ini Australia berkomitmen untuk memberikan paket bantuan tambahan sebesar AUD\$10 juta (Taylor, 2005). Paket bantuan sebesar AUD\$10 juta difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembagian lebih detail dapat dilihat di bawah (www.dfat.gov.au, 2001)

- Kesehatan, sekitar AUD\$4,5 juta.
Kegiatannya meliputi beasiswa, pelatihan untuk meningkatkan skill tenaga medis, kunjungan spesialis tenaga medis Australia, pelatihan penggunaan alat-alat kesehatan, bantuan obat-obatan.
- Pendidikan, sekitar AUD\$3,45 juta.
Kegiatannya meliputi beasiswa, pelatihan bagi guru, penyediaan alat-alat pendidikan.
- Manajemen limbah, sekitar AUD\$1 juta.
Digunakan untuk memperbaiki manajemen limbah, dengan tujuan mengurangi produksi limbah yang dihasilkan, dan dampak yang ditimbulkan.
- Perbaiki tangki-tangki air, sekitar AUD\$200.000
Australia akan bekerjasama dengan *Nauru Phosphate Corporation*, untuk merawat dan memperbaiki tangki serta saluran pipa. Tujuannya untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan air yang berasal dari air hujan.
- Pelatihan polisi, sekitar AUD\$150.000.
Bekerjasama dengan kepolisian Nauru untuk meningkatkan kemampuan polisi Nauru.

- Bantuan teknis, sekitar AUD\$700.000.
Menyediakan tenaga ahli dalam pelatihan, peralatan dan software untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan sensus, statistik, survey, dan perimigrasian.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah tabel bantuan luar negeri yang dikeluarkan pemerintah Australia pada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dari tahun 2001 hingga 2005 :

Country And Regional Programs Expenditure 2001-2005

Country	Expenses (\$m)			
	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005
Papua New Guinea	297.7	296.6	292.4	294.1
Retirement benefits	14.1	13.7	13.5	13.0
Subtotal PNG	311.8	310.4	305.9	307.1
Pacific				
Solomon Islands	19.1	24.0	79.2	92.6
Vanuatu	13.0	13.4	14.7	20.9
Fiji	12.3	13.9	14.4	17.4
Samoa	11.2	11.8	12.1	12.5
Tonga	8.8	9.6	9.0	9.2
Kiribati	8.2	8.3	7.9	7.5
Tuvalu	2.6	2.8	2.7	2.9
Micronesia	1.4	1.9	1.5	1.6
Cook Islands	1.3	1.0	1.2	1.2
Niue and Tokelau	0.8	0.9	5.0	1.2
Nauru	3.4	3.4	0.3	0.2
Pacific regional	54.5	58.8	54.2	73.7
Subtotal Pacific	133.4	146.6	202.2	240.9
<i>Nauru additional</i>	<i>18.8</i>	<i>21.3</i>	<i>15.5</i>	<i>13.5</i>

(Sumber : www.aid.gov.au, 2005)

Berdasarkan tabel tersebut, dilihat dari jumlah total bantuan yang diberikan Australia dalam kurun waktu 2001-2005, Papua Nugini merupakan negara di Pasifik Selatan yang menerima bantuan terbesar. Namun yang patut dicermati adalah, selain Papua Nugini, Nauru menjadi satu-satunya negara di kawasan Pasifik Selatan yang mendapat tambahan bantuan dari Australia. Bantuan yang diberikan oleh Australia tergolong sangat besar dan banyak, terutama mengingat ukuran Nauru yang hanya 21 km². Dari data-data yang dipaparkan di atas, timbul pertanyaan mengapa Australia meningkatkan bantuan finansial secara signifikan ke Nauru pada tahun 2001-2008?

Kebijakan Bantuan Luar Negeri Australia

Selain bantuan finansial, Australia juga mengirimkan tenaga-tenaga ahli untuk mengambil alih sektor keuangan dan kepolisian Nauru. Pengiriman tenaga ahli ini sebenarnya juga atas permintaan pemerintah Nauru. Permintaan ini direspon positif, karena merefleksikan salah satu tujuan bantuan luar negeri yang dicanangkan Australia, yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dalam suatu negara. Tenaga ahli Australia dalam sektor keuangan akan menempati posisi *Secretary of Finance* (www.foreignminister.gov.au, 2002). Tugasnya adalah mengeksplorasi sumber penerimaan baru, meningkatkan pendapatan yang sudah ada, reformasi anggaran dana pemerintah, mengurangi pengeluaran dan aktivitas pemerintah, dan memeriksa aset-aset tersisa yang dimiliki Nauru sebelum dilakukan restrukturisasi. Sementara tenaga ahli Australia dalam sektor kepolisian akan menempati posisi *Police Commissioner*.

"Australian Aid : Investing Growth, Stability, and Prosperity"

Pernyataan di atas merupakan kerangka kebijakan bantuan luar negeri Australia yang dicanangkan oleh Menteri Luar Negeri Australia pada masa itu, Alexander Downer, pada 24 September 2002 (www.foreignminister.gov.au, 2002). Bantuan Australia difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan, perdamaian, serta stabilitas kawasan. Pemerintah akan mengidentifikasi jalan yang terbaik untuk memaksimalkan dampak yang diharapkan. Menurut Downer, bantuan Australia lebih difokuskan pada Asia, namun secara khusus, Papua Nugini dan Pasifik Selatan tetap menjadi prioritas utama dalam bantuan luar negeri Australia. Hal ini juga untuk mengakomodasi desakan dari komunitas internasional dan publik Australia, agar pemerintah Australia lebih berperan sebagai pemimpin di kawasan regional Pasifik Selatan.

Downer menambahkan bahwa sebagian besar negara-negara di Pasifik Selatan, terutama di Melanesia, berpotensi untuk menjadi negara gagal (www.foreignminister.gov.au, 2002). Karena alasan kepentingan nasional, keamanan regional, dan humanitarian, maka Australia mempunyai kewajiban untuk membantu negara-negara tersebut. Keamanan menurut pemerintah Australia adalah menjaga integritas wilayah atau teritori Australia dari ancaman serangan militer dari pihak luar, dan menjaga stabilitas negara-negara tetangga. Pemerintah Australia memberikan bantuan luar negeri untuk mencegah konflik atau krisis yang terjadi di suatu negara meningkat, hingga dapat mengakibatkan instabilitas kawasan. Bantuan Australia memainkan peranan penting dalam pengembangan negara-negara yang pembangunannya terhambat karena krisis finansial atau konflik.

William Zartman dalam makalah Hussein Solomon dan Cornelia Cone yang berjudul "*The State and Conflict in the Democratic Republic of Congo*", menyebutkan suatu istilah, yaitu "*spiral of deterioration*" (Solomon, Cone, nd:58). Maksudnya adalah bahwa negara gagal tidak tercipta begitu saja, namun diibaratkan sebagai penyakit yang secara jangka panjang akan semakin melemahkan. Fungsi negara akan semakin menurun dan pada akhirnya akan mencapai titik dimana negara tidak berfungsi sama sekali. Tahap diantara negara yang kuat dan negara yang tidak berfungsi sama sekali adalah tahap dimana negara disebut negara gagal.

Menurut R.I. Rotberg, karakteristik negara gagal antara lain naiknya angka kriminalitas dan kekerasan politik, hilangnya kontrol terhadap perbatasan, perang sipil, penggunaan teror terhadap masyarakat, institusi yang lemah, kondisi infrastruktur yang makin buruk, sistem kesehatan kolaps,

menurunnya pendapatan per kapita (GDP), kekurangan cadangan makanan, legitimasi yang dipertanyakan, tingkat harapan hidup yang menurun, hilangnya kesempatan untuk bersekolah, dan inflasi (Solomon, Cone, nd:58). Dari karakteristik tersebut, Nauru memenuhi hampir semua ciri-ciri yang disebutkan.

Menurut mantan presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, negara gagal dapat menjadi tempat perlindungan bagi terorisme untuk berkembang. Selain itu juga menjadi tempat berkembangnya perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, penyebaran penyakit menular, migrasi ilegal, dan menciptakan arus penari suaka. Hingga bukan secara kebetulan bahwa usaha pelucutan terorisme internasional dan aktivitas kriminal transnasional berjalan bersamaan dengan meningkatnya perhatian terhadap negara-negara gagal. Terdapat kecenderungan untuk menggeneralisir bahwa negara gagal berpotensi menjadi tempat berkembangnya aktivitas kriminal dan terorisme. Untuk lebih jelas mengenai dampak yang ditimbulkan negara gagal terhadap negara tetangga, maupun terhadap kawasan regional pada umumnya dapat diketahui dari penjelasan berikut (Nguyen, 2005:5) :

- Terorisme Internasional

Pemerintah Australia berkata, “*we have come to understand better*”, pada pertemuan *ASEAN Regional Forum*. Pemerintah Australia berpendapat bahwa negara lemah dan gagal dapat mengancam keamanan dunia. Hal ini didasari oleh fakta bahwa negara Afghanistan dijadikan tempat berlindung oleh organisasi teroris, seperti Al-Qaeda. Selain itu Afghanistan juga menjadi tempat berkembangnya terorisme, karena banyak anak-anak muda yang tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, serta tidak punya pekerjaan dan berpendidikan rendah menemukan rasa aman dalam organisasi teroris. Tidak ada fakta tentang gerakan terorisme di Nauru, namun usaha-usaha Nauru untuk mendapatkan pemasukan dengan menjual paspor pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh jaringan teroris.

- Migrasi Ilegal

Dalam beberapa dekade terakhir, arus migrasi semakin meningkat, termasuk migrasi ilegal yang diperantarai oleh para penyelundup. Penyelundup tersebut memanfaatkan keputusan-pengungsi atau pencari suaka dengan memalsukan dokumen dan mengirim mereka ke tempat tujuan dengan metode yang berbahaya. Sejak gelombang pengungsi yang datang ke Australia dari Afghanistan dan Iraq terjadi pada tahun 1990an, muncul asumsi bahwa kebanyakan imigran ilegal datang dari negara gagal. Penelitian yang dilakukan Ronald Skeldon menemukan bahwa alasan utama terjadinya migrasi ilegal bukan karena kemiskinan, namun karena meningkatnya pengetahuan akan adanya kesempatan yang lebih baik di tempat lain.

Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan juga ikut membantu penyebaran migrasi ilegal, seperti penjualan paspor yang dilakukan oleh Nauru, Vanuatu, Kiribati, Tuvalu, Tonga dan Marshall Islands (Windybank, 2008). Nauru merupakan salah satu dari beberapa negara yang menyewa agen dalam melakukan penjualan di Asia. Walaupun negara-negara tersebut sudah menghentikan kegiatan penjualan paspor, ratusan paspor tetap tidak bisa terlacak.

- Pencucian Uang

Perdagangan obat-obatan terlarang, teroris, dan pencucian uang merupakan dampak-dampak yang biasa ditimbulkan oleh negara gagal. Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer fokus pada negara-negara di Pasifik Selatan, sebagai contoh negara gagal yang menyediakan kesempatan pencucian uang, penipuan pajak, dan penipuan untuk berkembang. Downer berkata, “*When you have a failed state, it's a state that can be exploited by people such as money launderers*”. *Federal Police Commissioner Mike Keelty* menambahkan, “*The activity is fostered by island countries with few resources to sell other than their financial names*” (Nguyen, 2005:6).

Pasca 9/11, kawasan Pasifik Selatan menarik perhatian dunia karena beberapa negara seperti Nauru, Niue, Cook Islands, dan Marshall Islands mendapatkan vonis dari *Financial Action Task*

Force (FATF) sebagai negara-negara yang melakukan pencucian uang. *Offshore banking* yang dilakukan negara-negara tersebut pada awalnya bertujuan untuk menambah pemasukan negara, namun manajemen perbankan dan sistem hukum yang lemah dimanfaatkan oleh pihak luar untuk melakukan pencucian uang (Windybank, 2008).

- Obat-obatan terlarang

Kawasan Pasifik Selatan sangat strategis sebagai tempat transit perdagangan obat-obatan terlarang menuju AS, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Mick Keelty mengamati bahwa 80% heroin yang masuk ke wilayah Australia berasal dari Asia, yaitu area Segitiga Emas, terutama Myanma. Menurut Antonio Maria Costa, *Executive Director of UN Office on Drugs and Crime*, anarki dan ketiadaan hukum sangat mendukung perkembangan perdagangan obat-obatan terlarang (Nguyen, 2005:6).

Bukti bahwa obat-obatan terlarang sudah memasuki kawasan Pasifik Selatan adalah dengan ditemukannya 357 kg heroin di sebuah gudang yang terletak di Suva, Fiji pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2004 ditemukan 120 kg heroin yang terkubur di pantai di daerah Port Villa, ibu kota Vanuatu. Sejumlah pengiriman kokain dengan skala besar juga berhasil digagalkan di Tonga (2001) dan Samoa (2006). Bahkan terdapat kecenderungan kawasan Pasifik Selatan berubah dari sebagai tempat transit menjadi tempat produksi obat-obatan terlarang. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 5 kg *chrystal methamine* dan bahan-bahan kimia yang mampu membuat 1000 kg heroin di Suva, Fiji pada tahun 2004 (Windybank, 2008).

- *Tampa Crisis*

Pada tahun 2001, PM pada masa itu yang berasal dari partai Liberal, yaitu John Howard memperkenalkan suatu kebijakan yang dinamakan "*Pacific Solution*" (www.eventpolynesia.com, 2008). Pada dasarnya, *Pacific Solution* adalah kebijakan untuk memproses para pencari suaka yang datang ke wilayah Australia dengan sistem *off-shore*. Terdapat dua negara di Pasifik Selatan yang mau bekerjasama dengan Australia dalam mendirikan kamp rehabilitasi di kedua negara tersebut atas biaya Australia. Negara yang pertama adalah Papua Nugini, tepatnya di Lombrum Naval Base yang bertempat di Manus Island, sekitar 350 km dari teluk utara Papua Nugini. Negara yang kedua adalah Nauru, negara republik terkecil di dunia (Simon, 2008). John Howard berharap *Pacific Solution* akan menjadi solusi dalam mengurangi arus manusia perahu atau imigran ilegal yang berusaha masuk wilayah Australia. Pemerintah Australia menekankan bahwa,

"the Government is firmly committed to ensuring the integrity of Australia's borders and to the effective management and control of the movement of people to and from Australia...Underlying these commitments is the fact that Australia is a sovereign country which decides who can and who cannot enter and stay on its territory" (www.lib.washington.edu, 2002).

Motivasi Bantuan Luar Negeri

Pada prinsipnya, semua transfer sumber daya riil dari suatu negara ke negara lain dapat dikatakan sebagai bantuan luar negeri. Todaro kemudian mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai setiap arus permodalan ke negara berkembang yang memenuhi dua kriteria pokok, yaitu, tujuan pemilik dana dalam memberikan bantuan tidak bersifat komersial dan mengandung syarat-syarat tertentu. Menurut Todaro (Todaro, 1998: 163), secara garis besar, motif bantuan luar negeri dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu :

- ✓ Motivasi politik

Motivasi politik merupakan motivasi paling vital dari negara donor dalam memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral, tidak terlepas dari syarat-syarat yang bermuatan politik. Contoh motivasi politis adalah adanya syarat bahwa negara penerima dalam menerima bantuan harus menerapkan pasar bebas, menerapkan perekonomian

terbuka, dan melakukan penyesuaian struktural yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan kapitalisme yang diusung oleh negara besar. Pearson dan Payaslian, dalam makalah yang ditulis oleh Dewi Utariah yang berjudul “*Ekonomi Sebagai Instrumen Politik Luar Negeri*”, mengajukan empat teori mengenai motivasi politis bantuan luar negeri, yaitu (www.pustaka.unpad.ac.id, 2007) :

- Aliran realis menyatakan, bahwa tujuan utama dari bantuan luar negeri adalah bukan untuk menunjukkan idealisme dalam hal kemanusiaan, tetapi untuk proyeksi *power* nasional. Bantuan luar negeri merupakan komponen penting bagi kebijakan keamanan internasional.
- Teori ketergantungan (*dependensia*) menyatakan bahwa bantuan luar negeri digunakan oleh negara kaya untuk mempengaruhi hubungan domestik dan luar negeri negara penerima bantuan. Merangkul elit politik lokal di negara penerima bantuan untuk tujuan komersil dan keamanan nasional. Kemudian, melalui jaringan internasional, keuangan internasional, dan struktur produksi, bantuan luar negeri ditujukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara penerima bantuan. Sehingga para penganut teori *dependensia*, menganggap bahwa bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai sebuah instrumen untuk perlindungan dan ekspansi negara kaya ke negara miskin, sebuah sistem untuk mengekalkan ketergantungan.
- Aliran idealis menyatakan bahwa bantuan luar negeri secara esensial merupakan gerakan kemanusiaan yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan internasional. Menurut aliran idealis, negara yang lebih kaya memiliki tanggung jawab moral untuk mempererat kerjasama Utara-Selatan yang lebih besar dan merespon kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial di Selatan. Maka kaum idealis berpendapat, bahwa bantuan luar negeri mendorong dukungan yang saling menguntungkan (*mutual supportive*) dan hubungan menguntungkan sejalan dengan pembangunan ekonomi dan hak azasi manusia, hukum dan ketertiban internasional.
- Teori *bureaucratic incrementalist* menyatakan bahwa bantuan luar negeri sebagai kebijakan publik, produk dari politik domestik, yang melibatkan opini publik, kelompok kepentingan, dan institusi pemerintah yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang mempromosikan kepentingan nasional melalui agenda politik. Teori ini juga menyatakan bahwa, tujuan yang dikejar negara donor dalam lingkup kepentingan ekonomi politik internasional antara lain, kombinasi tujuan kemanusiaan, geopolitik, ideologi, kepentingan komersil, masalah lingkungan, dan berbagai faktor dalam politik domestik.

✓ Motivasi ekonomi

Meskipun motivasi politis menjadi pertimbangan utama bagi negara donor dalam memberikan bantuan, namun logika dan perhitungan-perhitungan ekonomi selalu disertakan, paling tidak untuk menutupi alasan sebenarnya dalam memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan negara donor, walaupun murni diberikan karena alasan ekonomi tanpa adanya motivasi politis, pada akhirnya akan menguntungkan negara donor. Meningkatnya arus peminjaman sebagai ganti hibah dan usaha-usaha yang dilakukan negara donor dalam mengaitkan pemberian bantuan dengan keharusan membeli produk-produk dari negara donor yang mengakibatkan negara penerima bantuan terjerumus ke dalam utang yang lebih besar. Keadaan ini didukung dengan pernyataan mantan pejabat urusan luar negeri Amerika Serikat yang mengatakan:

”Salah paham yang paling besar mengenai program bantuan luar negeri adalah anggapan awam bahwa kita hanya mengirimkan uang begitu saja ke luar negeri. Kenyataannya tentu tidak demikian. Pengiriman bantuan luar negeri tersebut biasanya berwujud penjualan peralatan-peralatan, bahan baku, produk makanan, dan tenaga ahli secara kredit yang semuanya diberikan untuk mendukung proyek pembangunan tertentu yang telah diteliti dan disetujui.”(Todaro, 1998:164).

Continental Defence

Kebijakan Australia dalam mencegat kapal-kapal yang berusaha masuk secara ilegal ke wilayah Australia dan menurunkan paksa para pencari suaka di kamp rehabilitasi melanggar hukum internasional dan hukum domestik Australia. Dalam merespon insiden *Tampa Crisis* tersebut, pada tanggal 26 September 2001, Senat meloloskan beberapa undang-undang, antara lain (Simon, 2008) :

- *Migration Amendment (Excision from Migration Zone) Act 2001.*
- *Amendment (Excision from Migration Zone) (Consequential Provisions) Act 2001.*
- *Migration Legislation Amendment (Judicial Review) Act 2001.*
- *Migration Legislation Amendment Act (No. 1) 2001.*
- *Migration Legislation Amendment Act (No. 6) 2001.*
- *Border Protection (Validation and Enforcement Powers) Act 2001.*

Undang-undang di atas yang menjadi dasar atas apa yang disebut dengan *Pacific Solution*. Dalam undang-undang pertama, yaitu *Migration Amendment (Excision from Migration Zone) Act 2001*, Australia menetapkan Christmas Island, Ashmore, Cartier dan Cocos (Keeling) Island sebagai daerah terluar zona migrasi. Kebijakan *Pacific Solution* menetapkan, bahwa kedatangan kapal secara ilegal ke wilayah Australia akan diarahkan menuju kamp rehabilitasi di provinsi Manus dan Nauru. Sementara undang-undang *Border Protection (Validation and Enforcement Powers) Act 2001*, membenarkan tindakan militer Australia apabila terdapat kasus seperti dalam kasus kapal kargo Norwegia MV Tampa di masa depan. Secara umum undang-undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah Australia untuk menahan dan memindahkan suatu kapal tertentu bila kapal tersebut dicurigai mengangkut para pencari suaka.

Bantuan yang diberikan Australia terhadap Nauru merupakan paradigma keamanan yang baru. Paradigma keamanan baru ini muncul setelah negara-negara Barat mulai mengadopsi neo-liberalism sebagai prinsip-prinsip organisasi. Pemerintahan yang buruk atau negara gagal menggantikan ancaman komunis. Pada masa pemerintahan Howard, sudah mulai muncul dalam diskusi-diskusi politik dalam negeri, bahwa ancaman terhadap kepentingan dan integritas Australia datang dari lingkungan yang dekat. Ancaman baru ini bukan pengaruh komunis, namun efek dari pemerintahan yang lemah atau buruk di negara-negara tetangga (Maloney, nd).

Australia yang berada dalam kawasan Pasifik Selatan, secara langsung dikelilingi oleh negara-negara yang mempunyai pemerintahan yang lemah. Melihat situasi ini, Howard mengembangkan kebijakan baru yang bertujuan mencegah ancaman dari aktor non-negara, seperti teroris dan kejahatan transnasional (Maloney, nd). Howard menggunakan pendekatan preventif dan unilateralism seperti yang digunakan Bush untuk merespon ancaman-ancaman tersebut. Selain Nauru, contoh unilateralism dapat dilihat dari cara Howard menangani krisis di Solomon Islands pada tahun 2003. Howard ingin membuktikan bahwa Australia mampu menangani “masalah-masalah” di Pasifik secara unilateral, dan menolak bantuan dari negara-negara berkembang lainnya. Kenyataan ini juga membuka fakta bahwa Australia menggunakan ancaman terhadap keamanan regional sebagai kesempatan untuk menunjuk dirinya sebagai “*sheriff*” dan menjaga peran Australia sebagai kekuatan regional. Howard juga pernah berkata sebagai berikut:

“Instability in the South Pacific affects our ability to protect large and significant approaches to Australia. The government also has a duty to protect the safety of the 13.000 Australians resident in the countries of the region...transnational crime in and through the region, terrorism, drug trafficking, people smuggling, illegal immigration and money laundering, is a growing threat to Australia and the South Pacific countries themselves...” (Maloney, nd)

Keamanan regional

Terdapat kesadaran yang meningkat bahwa kepentingan nasional Australia dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di negara-negara tetangga, seperti Nauru. Ketidakstabilan di Nauru dapat menciptakan ancaman terhadap keamanan baik bagi Australia maupun kawasan. Negara gagal dapat mejadi tempat berkembangnya aktivitas kriminal transnasional, seperti peredaran senjata, obat-obatan, penyelundupan manusia, dan pencucian uang. Negara yang bangkrut akan mencari bantuan dari segala sumber baik negara maupun non-negara. Dan beberapa diantaranya dikhawatirkan Australia

dapat mengganggu keamanan regional. Hal ini sempat terbukti ketika pemerintah Nauru berusaha menjadikan Nauru sebagai tempat *offshore banking*¹ di daerah Pasifik Selatan.

Usaha pemerintah dilakukan dengan melonggarkan regulasi atau undang-undang perbankan. Namun karena manajemen yang buruk, dunia perbankan Nauru dijadikan lahan pencucian uang yang dilakukan oleh mafia, terutama mafia Rusia (www.ciao.net, 2006). Akibatnya pemerintah Nauru dimasukkan dalam daftar hitam oleh *Financial Action Task Force* (FATF) pada tahun 2001, karena dianggap negara yang tidak mau bekerjasama kampanye global melawan pencucian uang *atau Non Complying Countries and Territories* (NCCT) (www.mfat.govt.nz, 2008).

Konsep unilateralism dan konsep pertahanan Australia, *continental defense*, membuat Australia menaikkan bantuan finansialnya secara signifikan ke Nauru. Kasus pencucian uang yang menimpa Nauru dikhawatirkan akan menjadi pemicu dari kejahatan transnasional lainnya, seperti terorisme. Hal ini karena Nauru menggunakan segala cara untuk mendapatkan pemasukan. Cara lain yang mengkhawatirkan yang ditempuh Nauru adalah menjual paspor pada warga-warga asing. Australia memandang bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh Nauru berpotensi menciptakan kejahatan transnasional. Seperti penjualan paspor pada warga negara asing. Hal ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk mendapatkan kewarganegaraan Nauru dan mengembangkan jaringan teroris di Pasifik Selatan. Secara umum, keterlibatan Australia dalam membantu negara-negara Pasifik Selatan, seperti Solomon Island dan Nauru dipandang sebagai peniruan langkah Amerika Serikat, walau dalam skala kecil, sebagai negara dominan dalam pengambilan keputusan (Marks, 2003). Dalam kasus Australia, Australia ingin menjadi negara yang dominan dalam kawasan Pasifik Selatan. Faktor lain adalah kekhawatiran Australia bahwa negara-negara gagal di Pasifik Selatan akan menciptakan kejahatan transnasional.

Pemerintah Australia era Howard berkaca pada peristiwa seperti 9/11, bom Bali, dan penangkapan-penangkapan tokoh teroris yang dilakukan di Singapura, Indonesia, dan berbagai negara di Asia Tenggara. Fenomena-fenomena tersebut membuktikan bahwa ancaman terorisme sudah sangat dekat, dan jaringan terorisme yang makin luas (karena ditemukan hubungan antara Jemaah Islamiah dan Al-Qaeda) (Kabutaulaka, 2004:4). Menurut Tobias Debiel, terdapat bentuk terorisme baru, yaitu terorisme yang tidak mengenal geografis dan ideologis, hingga sangat sulit untuk memisahkan keamanan internal dan eksternal (Kabutaulaka, 2004:4). Maksudnya adalah, bahwa teroris pada masa sekarang akan menginfiltrasi negara gagal karena mudah untuk disusupi. Teroris hanya butuh tempat untuk berkembang, tidak memandang sistem politik negara yang dianut atau mayoritas agama yang dianut penduduk suatu negara.

Terorisme baru memberikan dampak terhadap kebijakan keamanan, terutama bagi negara-negara yang menganggap dirinya sebagai target dari terorisme, seperti, AS, Inggris, dan Australia. Ketiga negara ini berpendapat bahwa hukum internasional, yang dibentuk untuk mengakomodasi konflik antar negara, tidak mampu mengatasi terorisme baru. Secara khusus, ketiga negara tersebut memberikan perhatian khusus pada negara gagal yang mempunyai pemerintahan yang lemah dan tidak stabil untuk dimanfaatkan jaringan teroris. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa AS mempengaruhi kebijakan Australia di Pasifik Selatan. Namun bisa dikatakan agenda *War on Terrorism* yang diusung Bush mempengaruhi kebijakan Australia, era Howard pada khususnya. Hal ini tercermin dari istilah yang dikenal dengan "*Howard Doctrine*" pada tahun 1999, yang berisi :

"It stands to reason that if you believed that somebody was going to launch an attack against your country, either of a conventional kind or of a terrorist kind, and you had a capacity to stop it and there was no alternative other than to use that capacity, then of course you would have to use it" (Kabutaulaka, 2004:4).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Australia akan bertindak *pre-emptive strike* terhadap masalah di kawasan Pasifik Selatan yang dapat mengancam baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Australia. *The Economist* dan *Australia Strategic Policy Institute* mengklasifikasikan negara gagal dengan indikator seperti kapasitas negara dalam mengatur perekonomian, dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat (Kabutaulaka, 2004:5). Indikator di atas bila tidak berjalan dengan baik akan berujung pada kinerja ekonomi yang buruk, dan layanan pada masyarakat yang buruk. Indikator di atas juga diakui oleh pemerintah Australia, melalui pernyataan Howard pada parlemen sebelum melakukan intervensi pada Solomon Islands,

“If we do nothing now and the Solomon Islands becomes a failed state,...potential exploitation of that situation by international drug dealers, money launderers, international terrorism...will make the inevitable dealing with the problem in the future more costly, more difficult” (Kabutaulaka, 2004:5).

Howard Doctrine sangat mirip dengan yang dikeluarkan AS pada masa pemerintahan Bush melalui *National Security Strategy*, yang memandang negara gagal tidak hanya sebagai masalah humanitarian, namun juga sebagai masalah keamanan. *“Poverty, weak institutions, and corruption can make weak states vulnerable to terrorist networks and drug cartels within their borders.... America is threatened less by conquering states than by failing ones”* (Kabutaulaka, 2004:5). Ilustrasi masalah intervensi Australia pada Solomon Islands membantu menjelaskan peningkatan bantuan finansial Australia terhadap Nauru. Australia mengikuti jejak AS dalam *War on Terrorism* (WoT). Pengaplikasian WoT yang dilakukan Australia lebih difokuskan pada negara-negara di Pasifik Selatan. Pemerintah Australia akan melakukan intervensi terhadap negara-negara di Pasifik yang mempunyai kecenderungan menjadi negara gagal. Dalam kasus Nauru, intervensi yang dilakukan dengan meningkatkan bantuan finansial dan mengirimkan tenaga ahli dalam bidang ekonomi. Indikator Nauru mengarah menjadi negara gagal terletak pada performa ekonomi yang sangat buruk karena tidak adanya pemasukan negara, dan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan layanan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Selain itu, peningkatan bantuan finansial oleh Australia sangat bermuatan politis. Momen peningkatan bantuan finansial yang terjadi sejak tahun 2001 hampir bersamaan dengan penerapan *Pacific Solution*. Peristiwa *Tampa Crisis* berujung pada penempatan pencari suaka ke Nauru. Sebanyak 284 orang yang berasal dari Afghanistan dan Iraq ditempatkan di Nauru setelah insiden *Tampa Crisis* (www.ajustaustralia.com, 2003). Pencari suaka ini dijanjikan kehidupan yang lebih baik di Australia oleh penyelundup. Sejak peristiwa *Tampa Crisis*, program bantuan luar negeri Australia ke Nauru meningkat tajam. Antara tahun 1992 hingga 2001, Australia hanya memberikan total bantuan sebesar AUD\$24,6 juta dollar. Sementara sejak adanya *Pacific Solution* dan pendirian kamp rehabilitasi di Nauru, antara tahun 2001 hingga 2006, bantuan Australia meningkat hingga AUD\$123 juta (www.safecom.org, 2003). Peningkatan bantuan finansial terhadap Nauru sangat erat hubungannya dengan *Pacific Solution*. Mantan pejabat *AUSaid* mengkritisi transformasi kebijakan bantuan luar negeri Australia, dia mendeskripsikan bantuan luar negeri Australia sebagai bentuk “penyuapan” agar Nauru mau menampung pencari suaka yang terus berdatangan secara ilegal ke Australia (www.safecom.org, 2003).

Tuduhan “penyuapan” ini dikuatkan oleh Kieran Keke, Menteri Luar Negeri Nauru, yang menyatakan bahwa uang bantuan yang diterima Nauru hanya untuk memastikan bahwa Nauru tetap mau menjalankan program *Pacific Solution* (www.safecom.org, 2003). Analisis mengenai bantuan luar negeri Australia tahun 2005-2006 menimbulkan pertanyaan mengenai fokus dan prioritas bantuan luar negeri Australia. Contohnya adalah alokasi anggaran untuk *Police Development Program* mencapai AUD\$6,6 juta, sementara alokasi untuk kesehatan hanya AUD\$2,1 juta (www.safecom.org, 2003). Bantuan luar negeri Australia lebih banyak difokuskan untuk menanggung biaya dalam menjalankan kamp rehabilitasi daripada untuk kebaikan Nauru ke depan.

Walaupun mengisyaratkan bahwa bantuan yang diberikan Australia kental dengan unsur penyuaian, pada tanggal 31 Juli 2008, Menteri Luar Negeri Nauru, Dr. Kieran Keke, dan Menteri Luar Negeri Australia, Stephen Smith, menandatangani *MoU* baru. Dalam *MoU* ini, Nauru akan mendapatkan bantuan finansial sebesar \$29 juta. Bantuan ini meliputi sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan manajemen finansial, serta pembangunan sektor publik. *MoU* ini menandakan komitmen Australia untuk membantu Nauru memulihkan ekonomi dan layanan publik. *MoU* ini merupakan perjanjian kerjasama bantuan pertama antara Australia dan Nauru, setelah penutupan kamp rehabilitasi pengungsi. Kamp tersebut ditutup pemerintah Australia pada akhir Maret 2008 (www.aisaid.gov.au, 2008).

Kesimpulan

Peningkatan bantuan finansial Australia pada Nauru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah menjaga keamanan regional. Peristiwa 9/11 dan bom Bali, serta penangkapan tokoh-tokoh teroris di beberapa negara Asia Tenggara membuat Australia sadar bahwa ancaman terorisme sudah sangat dekat. Tindakan terorisme pasca 9/11 disebut dengan terorisme baru, yaitu para teroris mengincar negara-negara gagal untuk disusupi. Teroris sekarang tidak memandang sistem politik yang dianut suatu negara atau mayoritas agama yang dianut masyarakat suatu negara. Mereka hanya membutuhkan tempat untuk berkembang dan membentuk jaringan

Situasi krisis yang dialami Nauru membuat Australia harus bertindak cepat untuk mencegah Nauru menjadi negara gagal. Bantuan finansial akan menghindarkan Nauru mencari pemasukan dengan cara yang ilegal. Sebelumnya Nauru sempat masuk daftar hitam sebagai negara yang terlibat pencucian uang. Cara lain yang ditempuh untuk mendapatkan pemasukan adalah menjual kewarganegaraan pada warga negara asing yang berminat. Ketakutan akan terorisme ini secara tidak langsung tertular oleh *War on Terrorism* yang dijalankan AS. Bila AS menerapkan dalam skala dunia, maka Australia menerapkan dalam skala yang lebih kecil, yaitu kawasan Pasifik Selatan. Ketakutan ini dituangkan dalam kebijakan luar negeri yang bersifat *unilateralism* dan konsep pertahanan *continental defence*.

Unilateralism adalah Australia lebih bertindak sendiri dalam pengambilan keputusan di Pasifik Selatan. Tujuannya adalah untuk menjaga hegemoni Australia sebagai negara besar di kawasan. Sedangkan konsep *continental defence* adalah Australia lebih memfokuskan perhatian pada keamanan regional. Instrumen yang digunakan tidak hanya melalui militer, namun juga diplomasi, hubungan ekonomi, dan bantuan luar negeri. Faktor yang pertama lebih menitikberatkan pada bagaimana Australia mencegah Nauru menjadi negara gagal yang dapat mengancam keamanan regional. Usaha yang ditempuh dengan menaikkan bantuan finansial termasuk mengirimkan tenaga ahli, seperti dalam hal keuangan.

Faktor yang kedua yaitu kepentingan politis yang dibawa Australia mengenai masalah pencari suaka. Banyak pencari suaka yang datang ke wilayah Australia secara ilegal. Hingga puncaknya pada tahun 2001, terjadi peristiwa *Tampa Crisis*. *Tampa Crisis* ini memaksa Australia mengeluarkan kebijakan *Pacific Solution*, yaitu pencari suaka akan diproses di luar wilayah Australia. Salah satu negara yang mau menampung pencari suaka tersebut adalah Nauru. Kenaikan bantuan finansial secara signifikan pada Nauru bertepatan dengan peristiwa *Pacific Solution*. Faktor yang kedua lebih kepada motivasi politis yang dibawa Australia. Dengan menaikkan bantuan finansial, maka Australia berharap Nauru akan tetap mau menampung pencari suaka yang terus berdatangan secara ilegal ke wilayah Australia. Australia memerlukan Nauru karena kebijakan Australia yang menerapkan sistem *off-shore* dalam memproses pencari suaka ilegal.

Daftar Pustaka

Buku

Silalahi, Ulber. 2006. "Metode Penelitian Sosial". Unpar Press. Bandung.

Todaro, Michael P. 1998. "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga". New York:
University of New York Press

Situs Internet

ADB.org. 2007. "Country Economic Report: Nauru". Tersedia di:
<http://www.adb.org/Documents/CERs/NAU/CER-NAU-2007.pdf>.

ADB.org. 2008. "Asian Development Bank and Nauru". Tersedia di:
http://www.adb.org/Documents/Fact_Sheets/NAU.asp.

AjustAustralia.com. 2003. "Two Years and Still Counting: The Nauru Detainee". Tersedia di:
http://www.ajustaustralia.com/downloads/aja_nauru_brief_dec2003.pdf.

AusAID. 2002. "MOU on Asylum Seekers Signed with Nauru". Tersedia di:
http://www.foreignminister.gov.au/releases/2002/fa181_02.html. Diakses pada 23 September 2008.

AusAID. 2004. "New Memorandum of Understanding Signed with Nauru". Tersedia di:
http://www.aisaid.gov.au/media/release.cfm?BC=Media&ID=6395_4494_4799_4518_709.

AusAID. 2005. "Humanitarian Action Policy". Tersedia di:
http://www.aisaid.gov.au/publications/pdf/humanitarian_policy.pdf.

AusAID. 2005. "Ministerial Responsibilities". Tersedia di:
<http://www.aisaid.gov.au/anrep/rep05/s5.html>.

AusAID. 2006. "Australian Aid: Promoting Growth and Stability". Tersedia di:
<http://www.aisaid.gov.au/publications/pdf/whitepaper.pdf>.

AusAID. 2008. "Australia and Nauru Sign Memorandum of Understanding". Tersedia di:
http://www.aisaid.gov.au/media/release.cfm?BC=Media&ID=9063_9504_5188_5442_6775.

Australia Network. 2008. "Nauru". Tersedia di:
http://australianetwork.com/news/countries/NAURU_to.htm.

BBC News. 2008. "Country Profile: Nauru". Tersedia di http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/country_profiles/1134221.stm.

BBC News. 2004. "Nauru in Grip of Financial Crisis". Tersedia di
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3628121.stm>.

Britannica.com. "Nauru". Tersedia di:
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/406671/Nauru/54010/History>.

CIAO.net. 2006. "Nauru: Economic Sector". Tersedia di
http://www.ciaonet.org/atlas/NR/Economy/Background/20060724_0391.html.

Crisis State Workshop. 2006. "Crisis, Fragile, and Failed State". Tersedia di
<http://www.crisisstates.com/download/drc/FailedState.pdf>.

- Department of Foreign Affairs and Trade. 2001. "MOU on Asylum Seekers". Tersedia di: http://www.dfat.gov.au/media/releases/foreign/2001/fa177_01.html.
- Economypoint.org. 2006. "Nauru Phosphates Royalties Trust". Tersedia di: <http://www.economy-point.org/n/nauru-phosphates-royalties-trust.html>.
- Eventpolynesia.com. "Australia Scraps Pacific Solution". Tersedia di: http://www.eventpolynesia.com/news&info/australia/galleryarchive/AU2_page_gal28jan08.htm.
- Field, Michael. 2006. "Nauru's Passport Secrets". Tersedia di: <http://www.michaelfield.org/nauru20.htm>.
- Global Education. 2008. "Australia's Aid Program". Tersedia di: <http://www.globaleducation.edna.edu.au/globaled/go/pid/24>.
- Lashmar, Paul. 2003. "Nauru Bows to US and Shuts Down Its Banks". Tersedia di: <http://www.independent.co.uk/news/business/news/nauru-bows-to-us-and-shuts-down-its-banks-595021.html>.
- Marks, Kathy. 2003. "Australia Moots Radical Future For Bankrupt Nauru". Tersedia di: <http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/australia-moots-radical-future-for-bankrupt-nauru-577190.html>.
- Nationsencyclopedia.com. 2008. "Nauru History". Tersedia di <http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Nauru-HISTORY.html>.
- "Nauru". 2005. Tersedia di: <http://www.paddle.usp.ac.fj/collect/paddle/index/assoc/nau001.dir/doc.pdf>.
- "Nauru". Tersedia di: <http://www.mfat.govt.nz/Countries/Pacific/Nauru.php>.
- Oxfam. 2002. "Adrift in The Pacific: The Implications of Australia's Pacific Refugee Solution". Tersedia di <http://www.lib.washington.edu/southeastasia/Adrift.html>.
- Realityofaid.org. 2002. "Australian Aid: Promoting Insecurity?". Tersedia di: <http://www.realityofaid.org/roareport.php?table=roa2006&id=16>.
- Safecom.org. 2003. "Tampa 2007: The cost and The Bill. Tersedia di: <http://www.safecom.org.au/tampa2007-pacific-report.htm>.
- Sproll.com. 2005. "What's Left For Nauru". Tersedia di: <http://www.sproll.com/?p=213>.
- Squires, Nick. 2008. "Tough Times for Nauru as Money Runs Out". Tersedia di: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1581613/Tough-times-for-Nauru-as-money-runs-out.html>.
- The World Factbook. 2008. "Nauru". Tersedia di: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nr.html>.
- US Department of State. 2008. "Country Profile". Tersedia di: <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/16447.htm#gov>.
- "Why Incorporate or Bank Offshore?". Tersedia di <http://www.steyn.info/offshore.html>.

Jurnal, Laporan, Publikasi Berkala

- "Conflict In Nauru". Tersedia di: <kava.student.usp.ac.fj/class-shares/DG406/additional%20readings/Nauru/Conflict%20in%20Nauru.doc>.

- Firth, Steward. 2005. "Australia in International Politics: An Introduction to Australia Foreign Policy". Second Edition.
- Hoadley, Stephen. "Pacific Island Security Management by Australia and New Zealand: Towards a New Paradigm". Centre for Strategic Studies. Working Paper No.20/05. Tersedia di www.victoria.ac.nz/css/docs/Working_Papers/wp20.pdf.
- Hughes, Helen. 2004. "From Riches to Rags: What are Nauru's Option and How Australia Can Help?". Tersedia di: http://www.cis.org.au/issue_analysis/IA50/IA50.PDF.
- Kabutaulaka, Tarcisius Tara. 2004. "Failed State and The War of Terror: Intervention in Solomon Islands". Tersedia di: <http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/api072.pdf>.
- Maloney, Max. "State Failure in The Pacific: Howard vs Rudd". Tersedia di: <http://www.unya.org.au/perspective/2009winter/PerspectiveWinter2009-MayMaloney.pdf>.
- Nguyen, Minh. 2005. "Australia and the Notion of State Failure". Tersedia di: http://www.uniya.org/research/state_failure.pdf.
- Schmidt, Steffen. 2002. "Nauru Ruined". Tersedia di: <http://www.public.iastate.edu/~sww/coastalcase%20studies/nauru.htm>.
- Simon, Kathryn. 2008. "Asylum Seeker". Tersedia di: [http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlament/publications.nsf/0/C922B00EBF9A897DC A2575070020874A/\\$File/ASYLUMFinal&Index.pdf](http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlament/publications.nsf/0/C922B00EBF9A897DC A2575070020874A/$File/ASYLUMFinal&Index.pdf).
- Solomon, Hussein, Cornelia Cone. "The State and Conflict in The Republic Democratic of The Congo". Tersedia di [http://academic.sun.ac.za/mil/scientia_militaria/Internet%20Vol%2032\(1\)/hussein\(2\).pdf](http://academic.sun.ac.za/mil/scientia_militaria/Internet%20Vol%2032(1)/hussein(2).pdf).
- Taylor, Savitri. 2005. "The Pacific Solution or Pacific Nightmare?". Tersedia di: http://globalism.rmit.edu.au/files/SOI/pacific_solution.pdf.
- Thurer, Daniel. 2001. "The Failed State and International War". *International Review of the Red Cross* No. 836, p. 731-761. Tersedia di <http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/57JQ6U>.
- United Nation. Background Note : Nauru. Tersedia di: <http://www.un.int/nauru/nauru.pdf>.
- Utariah, Dewi. 2007. "Ekonomi Sebagai Instrumen Politik Luar Negeri". Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Padjadjaran. Tersedia di: http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/ekonomi_sebagai_instrumen_politik_luar_negri.pdf.
- Wainwright, Elsina. 2003. "Responding State Failure: The Case of Australia and Solomon Islands". *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 57, No. 3, pp. 000-000, November 2003. Tersedia di: http://www.aspi.org.au/pdf/SI_AJIA.pdf.
- Ware, Helen. 2005. "Demography, Migration, and Conflict in the Pacific". *Journal of Peace Research*, vol. 42, no. 4, 2005, pp. 435-45. Tersedia di: <http://jpr.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/4/435>.
- Windybank, Sue. 2008. "The Illegal Pacific Part I: Organised Crime". Centre for Independent Studies. Vol. 24 No. 1. Tersedia di http://www.cis.org.au/policy/winter08/links/windybank_winter08.pdf.

